

Peran Komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) dalam Advokasi Kekerasan Berbasis Online (KBGO)

Fitria Juliana¹, Yustika Irfani Lindawati²

¹⁻² Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: 2290230062@untirta.ac.id; yustikairfani@untirta.ac.id

Artikel histori:

Submit: 08-04-2026

Revisi: 23-05-2026

Diterima: 01-06-2026

Terbit: 12-06-2026

Kata Kunci:

gerakan anti kekerasan,
aktivis digital,
perundungan, advokasi
berbasis korban

Korespondensi:

2290230062@untirta.ac.id

Abstract: *This study examines the role of the Generasi Anti Kekerasan (GAK) community in responding to Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia, particularly cyberbullying, doxing, online harassment, and digital discrimination. The study aims to analyze how GAK carries out digital education, victim advocacy, anti-victim blaming campaigns, and cross-sector collaboration in addressing technology-facilitated gender-based violence. This research employed a qualitative approach using a descriptive case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving members and facilitators of the GAK community. The findings reveal that GAK functions as a digital social movement that not only disseminates information regarding OGBV prevention, but also builds collective awareness, solidarity, and victim-centered advocacy practices. GAK conducts digital literacy education through social media campaigns, public discussions, hashtag activism, and capacity-building activities aimed at increasing awareness of digital safety and gender justice. The study also shows that victim assistance requires emotional support, digital protection, legal referral mechanisms, and collaborative networks involving educational institutions, psychologists, civil society organizations, and digital platforms. This study highlights that grassroots digital communities play a strategic role in creating safer digital spaces and strengthening gender-sensitive digital citizenship. The findings contribute to the development of studies on digital sociology, feminist digital activism, and community-based advocacy in addressing Online Gender-Based Violence in Indonesia.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Ruang digital, terutama media sosial, kini menjadi arena utama bagi masyarakat untuk

mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam diskursus publik, serta memperluas jejaring sosial tanpa batas geografis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena baru yang membawa dampak serius, yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO), suatu bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyerang individu berdasarkan gender atau seksualitasnya.

Menurut laporan Komnas Perempuan (2024), kasus kekerasan berbasis gender siber terus meningkat setiap tahun seiring berkembangnya penggunaan media sosial di Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 500 kasus KBGO yang dilaporkan secara langsung kepada Komnas Perempuan, dengan peningkatan sekitar 12-14% dibanding tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi termasuk penyebaran konten intim tanpa izin (non-consensual intimate content), pelecehan daring, ancaman kekerasan seksual, serta praktik doxing terhadap perempuan yang aktif di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa digital belum menjadi ruang yang netral gender, melainkan masih merefleksikan ketimpangan sosial dan budaya patriarki dalam masyarakat (Komnas Perempuan, 2023).

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang berkaitan dengan kekerasan di ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Sebagian korban memilih tidak melaporkan kasus yang dialami karena takut disalahkan dan meragukan penanganan aparat. Selain itu, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur doxing, padahal praktik tersebut kerap menjadi pintu masuk bagi bentuk kekerasan lain yang lebih serius (Karimi et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan perspektif teori gerakan sosial (social movement theory) untuk menganalisis bagaimana Komunitas Sosial Anti Kekerasan Indonesia merespons isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di ruang digital. Fokus penelitian diarahkan pada kontribusi komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan KBGO melalui edukasi publik, pendampingan korban, dan penguatan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi digital dengan menempatkan komunitas sosial sebagai aktor gerakan sosial digital dalam penanganan KBGO.

KAJIAN LITERATUR

Penanganan KBGO tidak dapat hanya dilakukan dengan menghapus konten atau memblokir akun pelaku. Korban membutuhkan perlindungan yang lebih menyeluruh, mulai dari keamanan data, dukungan emosional, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan rasa aman. UNFPA (2024) menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada korban atau victim-centered approach. Pendekatan ini menempatkan keselamatan, kerahasiaan, persetujuan, dan pilihan korban sebagai hal utama dalam setiap proses pendampingan. Dengan demikian, korban tidak boleh dipaksa untuk mengambil langkah tertentu, tidak boleh disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, dan harus diberikan ruang aman untuk memutuskan bentuk bantuan yang dibutuhkan.

Generasi Anti Kekerasan (GAK) merupakan komunitas di bawah Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu yang berfokus pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan, khususnya KBGO. GAK aktif melakukan edukasi publik, kampanye anti-kekerasan, pelatihan

literasi digital, serta pendampingan korban melalui media sosial dan kegiatan komunitas. Aktivitas tersebut memperlihatkan peran GAK sebagai gerakan sosial digital yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya KBGO.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan verbal, intimidasi, dan penyebaran data pribadi tanpa izin (Shalatan et al., 2026). KBGO juga berdampak serius terhadap kesehatan mental, rasa aman, dan kepercayaan diri korban, terutama perempuan dan remaja (Komnas Perempuan, 2023). Namun, kajian mengenai komunitas sosial sebagai aktor gerakan digital dalam penanganan KBGO masih relatif terbatas.

Aktivisme digital juga dapat dipahami melalui teori framing. Dalam teori ini, gerakan sosial tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami suatu masalah. Dalam isu KBGO, komunitas berperan membingkai kekerasan digital bukan sebagai persoalan pribadi korban, melainkan sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan ketimpangan gender, lemahnya literasi digital, dan kurangnya perlindungan terhadap korban. Melalui narasi anti-victim blaming, kampanye keamanan digital, serta ajakan untuk berpihak kepada korban, komunitas dapat membantu mengubah pandangan masyarakat agar lebih empatik dan tidak menyalahkan korban (Kowalski et al., 2014).

Selain itu, pendekatan feminisme digital juga relevan untuk memahami gerakan komunitas dalam melawan KBGO. Feminisme digital melihat ruang digital sebagai tempat yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ruang digital dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga dapat digunakan sebagai sarana perlawanan, edukasi, dan solidaritas. Perempuan dan kelompok rentan tidak hanya ditempatkan sebagai korban, tetapi juga sebagai subjek aktif yang mampu menyuarakan pengalaman, membangun dukungan, dan mendorong perubahan sosial. Dalam hal ini, komunitas GAK dapat dipahami sebagai ruang kolektif yang mendorong kesadaran kritis terhadap kekerasan berbasis gender sekaligus memperkuat keberanian masyarakat untuk melawan kekerasan digital (Ratnasari et al., 2021).

Karena itu, penelitian ini berfokus pada peran komunitas GAK dalam membangun gerakan sosial digital melalui edukasi, kampanye, dan pendampingan bagi korban sebagai bentuk resistensi terhadap kekerasan berbasis gender secara online. Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian tersebut, pertanyaan penelitian yang dari tulisan ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana strategi edukasi digital dan kampanye kesadaran yang dilakukan Komunitas GAK dalam mencegah serta menanggulangi KBGO di ruang digital? 2) bagaimana mekanisme pendampingan dan advokasi korban yang dilakukan Komunitas GAK dengan pendekatan berpusat pada korban? 3) apa saja hambatan struktural yang dihadapi Komunitas GAK dalam mengadvokasi perlindungan korban KBGO?

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Komunitas Generasi Anti Kekerasan (GAK) dalam merespons dan mengadvokasi kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui edukasi digital, pendampingan korban, kampanye kesadaran, dan kolaborasi lintas aktor, yang dijabarkan ke dalam tujuan penelitian khusus sebagai berikut: 1) menganalisis strategi edukasi digital dan kampanye kesadaran yang dilakukan Komunitas GAK dalam mencegah serta menanggulangi KBGO di ruang digital, 2) menjelaskan mekanisme pendampingan dan advokasi korban yang dilakukan Komunitas GAK melalui pendekatan berpusat pada korban, dan 3)

menguraikan hambatan struktural yang dihadapi Komunitas GAK dalam mengadvokasi perlindungan korban KBGO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study) yang berfokus pada komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) sebagai subjek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman secara mendalam terkait dinamika komunikasi, pola gerakan sosial, dan strategi advokasi yang dijalankan oleh komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) dalam merespons permasalahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna sosial, pengalaman subjektif, dan praktik komunikasi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Peneliti berfokus pada kondisi isu sosial kekerasan yang beredar diberbagai fenomena sosial, dengan menjadi salah satu individu yang tergabung dalam komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK), baik sebagai pengurus maupun anggota aktif yang berperan dalam kegiatan kampanye dan edukasi terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa para informan memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terhadap aktivitas serta dinamika gerakan sosial yang dijalankan komunitas (Sugiyono, 2018).

Subjek penelitian terdiri dari 2 orang pendamping dari Badan Pengurus Harian (BPH) GAK yang berperan dalam pengelolaan program dan pendampingan kegiatan Capacity Building, 1 orang anggota aktif GAK yaitu Kak Meysa, serta 1 orang anggota regional Banten yaitu Kak Raden, yang berperan sebagai brand ambassador dalam penyebaran kampanye anti kekerasan di ranah digital. Sebagian besar anggota komunitas yang terlibat merupakan pelajar tingkat SMA kelas XII. Selain itu, beberapa anggota komunitas lainnya turut berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan Capacity Building sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

Pelaksanaan dilakukan pada lingkungan kegiatan komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) yang berfokus pada isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan bullying. Komunitas ini aktif melakukan edukasi, kampanye, serta advokasi terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun ruang digital. Pengumpulan data dilakukan dalam konteks kegiatan Capacity Building GAK yang diselenggarakan di Nutrihub, Banten, pada tanggal 26 Juli 2025, sebagai salah satu lokasi dan waktu penelitian. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif jenis studi kasus yang mengacu pada Creswell (2018). Analisis dilakukan dengan menelaah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan strategi advokasi serta gerakan sosial komunitas Gerakan Anti Kekerasan (GAK) dalam menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Validasi data dilakukan melalui beberapa langkah utama, yakni triangulasi sumber dan metode, verifikasi partisipan (member check), refleksivitas peneliti, serta audit trail.

PEMBAHASAN

Profil Komunitas GAK dan Isu KBGO

Generasi Anti Kekerasan (GAK) adalah komunitas di bawah Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). GAK berkomitmen untuk memastikan hak anak terpenuhi, termasuk pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengadvokasi kesetaraan gender dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan sosial didefinisikan sebagai bentuk organisasi dan aksi bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengekspresikan kepentingan, nilai, dan aspirasi tertentu, serta mendorong perubahan sosial di dalam masyarakat (Tilly, 2004).

Gerakan Anti Kekerasan (GAK) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, pendampingan, dan edukasi masyarakat terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Komunitas ini menjadi wadah bagi anak muda dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial yang berfokus pada keadilan gender serta keamanan digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPH GAK, anggota aktif seperti Ka Meysa, serta perwakilan regional Banten yaitu Ka Raden, diketahui bahwa GAK menjalankan aktivitasnya melalui kombinasi kegiatan daring dan luring dengan tujuan menciptakan ruang aman bagi semua orang, khususnya perempuan dan kelompok rentan di dunia maya.

Dalam aktivitas sehari-harinya, komunitas GAK membangun sistem kerja berbasis solidaritas dan kesetaraan. Kegiatan dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti diskusi publik, kampanye di media sosial, pelatihan literasi digital, hingga pendampingan korban kekerasan. Hasil observasi menunjukkan bahwa komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak isu sosial, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolektif yang mempertemukan berbagai latar belakang anggota. Pendekatan yang digunakan dalam setiap kegiatan bersifat partisipatif setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman, dan berkontribusi dalam merancang solusi terhadap permasalahan KBGO.

“GAK lahir dari kebutuhan nyata yang kami lihat di lapangan. Banyak anak muda, terutama perempuan, yang tidak tahu harus ke mana ketika mengalami kekerasan digital. Maka kami hadir bukan hanya sebagai komunitas, tapi sebagai ruang aman bagi siapa saja yang membutuhkan perlindungan, dukungan, dan keberanian untuk bersuara.” (Pendamping BPH GAK, wawancara 26 Juli 2025).

“Saya bergabung di GAK karena saya percaya perubahan sosial bisa dimulai dari komunitas kecil seperti kami. Di sini, saya belajar bahwa kekerasan berbasis gender online bukan isu yang bisa dianggap sepele. Setiap anggota punya peran untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, dimulai dari cara kita bersikap dan bersolidaritas dengan korban.” (Kak Meysa, anggota aktif GAK, wawancara 26 Juli 2025).

Strategi Edukasi Digital dan Kampanye Kesadaran

Berdasarkan hasil diskusi dengan pendamping BPH GAK, dapat diketahui bahwa komunitas ini berfokus pada dua arah gerakan utama, yakni pencegahan kekerasan melalui edukasi publik, dan penanganan kasus melalui jaringan pendampingan korban. Dalam konteks pencegahan, GAK aktif melakukan kampanye kesadaran dengan mengusung tagar seperti #StopKBGO dan #AmanBersamaGAK. Melalui kegiatan kampanye, komunitas mengedukasi masyarakat agar lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan digital seperti doxing, pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, hingga cyberbullying. Selain kampanye daring, kegiatan luring juga dilakukan dalam bentuk Capacity Building di lokasi Nutrihub, di mana anggota komunitas dan peserta diskusi membahas isu-isu kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, termasuk bullying dan KBGO yang kerap dialami anak muda.



Gambar 1 Foto Kegiatan Capacity Building Kolaborasi GAK) bersama Founder

Dalam hasil wawancara yang dilakukan pada 26 Juli 2025 dengan Kak Meysa selaku anggota aktif GAK yang masih duduk di bangku kelas XII, disebutkan bahwa fokus utama GAK bukan hanya memberikan pemahaman mengenai bahaya KBGO, tetapi juga mendorong masyarakat untuk peduli dan berani mengambil langkah konkret dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman. Pendekatan yang digunakan komunitas ini berpusat pada korban (*victim-centered approach*), artinya segala bentuk kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, privasi, serta kenyamanan korban. GAK menolak praktik *victim blaming* yang sering muncul di masyarakat dan justru membangun narasi empati serta dukungan sosial. Selanjutnya, hasil wawancara pada 26 April 2025 dengan Kak Raden, anggota GAK Regional Banten dan bagian dari brand ambassador komunitas, menjelaskan bahwa GAK berfungsi sebagai ruang advokasi yang memadukan kampanye digital dengan kerja kolaboratif antarwilayah. GAK Banten, misalnya, sering terlibat dalam kolaborasi bersama lembaga seperti Feminis Yogya dan Czech Aid dalam kegiatan bertema Gender & Mental Well Being: Kenali Tubuhmu, Sehatkan Jiwamu. Kegiatan semacam ini menunjukkan bahwa GAK tidak hanya fokus pada kekerasan sebagai fenomena hukum, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan mental korban dan masyarakat.

Di Indonesia, media digital, termasuk media sosial, memainkan peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi gerakan feminisme digital. Kajian oleh Purwaningtyas (Purwaningtyas, 2021) memaparkan bahwa platform media sosial berfungsi sebagai ruang bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk

mendekonstruksi pandangan gender yang sering kali kaku dan stereotipikal di masyarakat. Melalui penggunaan media sosial, para aktivis dapat menyebarkan konten edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dan kekerasan online berbasis gender. Konten-konten ini mencakup informasi mengenai hak-hak perempuan, strategi menghadapi kekerasan online, serta cara untuk melaporkan dan mengatasi berbagai bentuk pelecehan di dunia maya.

Kampanye gerakan anti kekerasan bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) melalui langkah strategis yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. GAK menyelenggarakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan staf institusi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, serta meluncurkan kampanye kesadaran publik. Selain itu, GAK berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk merumuskan dan mengimplementasikan SOP yang berpihak pada korban, serta melakukan advokasi untuk mendorong perubahan regulasi hukum yang lebih spesifik terkait pelecehan digital. Untuk mengatasi stigma terhadap korban, terutama perempuan, GAK meluncurkan kampanye anti-stigma dan mendorong pembentukan kelompok dukungan. GAK juga membangun jejaring dengan lembaga hukum dan psikolog untuk menyediakan sumber daya bagi korban, serta mengadakan pelatihan bagi relawan untuk memberikan pendampingan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, GAK berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban KBGO serta mendorong perubahan sistemik yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Kolaborasi dilakukan melalui mekanisme lintas sektor:

- a. GAK: melakukan pendataan, pendampingan emosional, dan pengawasan publik.
- b. Kampus: menyediakan ruang aman, dukungan administratif, dan jalur pelaporan internal.
- c. Polisi: menangani aspek hukum dan perlindungan formal.
- d. Tantangan utama adalah koordinasi dan kepercayaan antar-aktor.

Terkait kampanye gerakan anti kekerasan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan berikut ini:

“Kampanye digital yang kami lakukan bukan sekadar mengunggah konten. Kami berusaha membangun narasi yang empati dan membuat orang berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi atau berkomentar negatif. Tagar seperti #StopKBGO dan #AmanBersamaGAK kami gunakan agar isu ini terasa dekat dan relevan bagi generasi muda yang aktif di media sosial.” (Kak Raden, anggota GAK Regional Banten, wawancara 26 April 2025).

“Edukasi yang kami berikan selalu dimulai dari kesadaran bahwa KBGO bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah sosial yang berakar dari budaya. Kami tidak hanya menjelaskan apa itu doxing atau cyberbullying, tapi juga mendorong masyarakat untuk menjadi sekutu yang aman bagi korban, bukan justru menambah beban dengan menyalahkan atau mempertanyakan pengalaman mereka.” (Pendamping BPH GAK, wawancara 26 Juli 2025).

Mekanisme Pendampingan dan Advokasi Korban

GAK menjembatani dengan pendekatan restoratif dan komunikatif, agar fokus tetap pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya kekerasan. Salah satu

kasus bullying dan penyebaran kekerasan berbasis gender online, yang saat ini mendapat perhatian publik adalah perundungan yang terjadi di Binus School Serpong. Seorang siswa harus dilarikan ke rumah sakit setelah diduga menjadi korban bullying oleh seniornya, yang mengharuskan calon anggota geng untuk menjalani serangkaian tindakan yang merugikan, termasuk kekerasan fisik. Setelah menyebarkan informasi tidak akurat (Doxing), pada sebuah akun di X mengunggah cuitan yang menyebutkan bahwa sekelompok siswa senior melakukan perundungan terhadap anggotabarunya yang ingin bergabung dengan kelompok mereka. Cuitan tersebut juga menyebutkan bahwa anggota baru diminta untuk membelikan makanan dan mengalami kekerasan fisik serta verbal (Yuli et al., 2024).

Gerakan Anti Kekerasan (GAK) telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menanggapi laporan kasus doxing, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan siber yang dapat berujung pada bullying. GAK memulai proses dengan melakukan verifikasi informasi untuk memastikan keakuratan data yang diterima, sehingga dapat mencegah stigma dan mengumpulkan bukti yang valid. Selain itu, GAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban, yang penting untuk mengurangi risiko balas dendam dan memberikan rasa aman bagi mereka yang melapor. GAK juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban dengan pendekatan yang sensitif, membantu mereka mengatasi trauma emosional dan membangun kembali kepercayaan diri.

Dalam upaya mengatasi konten merugikan, GAK melaporkan konten tersebut kepada platform digital untuk dihapus, sehingga dapat menghilangkan jejak digital dari tindakan bullying dan mencegah penyebarannya lebih lanjut. Selain itu, GAK berkoordinasi dengan lembaga hukum dan pihak kampus untuk memastikan adanya tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku bullying dan memperkuat kebijakan anti-bullying di lingkungan kampus. Terakhir, GAK berfokus pada edukasi publik mengenai pentingnya privasi digital dan dampak negatif dari tindakan doxing dan bullying, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya bullying serta mengadakan kampanye untuk mendidik mereka tentang empati dan toleransi.

Ketika Gerakan Anti-Kekerasan (GAK) pertama kali menerima laporan kasus doxing, langkah awal yang diambil adalah melindungi identitas dan privasi korban dengan memastikan bahwa semua data pribadi, seperti nama, alamat, akun media sosial, dan nomor kontak tidak tersebar lebih luas. GAK juga membantu korban melaporkan kasusnya ke pihak berwenang atau platform digital terkait agar konten yang melanggar bisa segera dihapus. Selain perlindungan data, GAK memberikan pendampingan komunikasi dan emosional, membantu korban mengatur langkah-langkah lanjutan agar tetap aman secara digital maupun psikologis. Tantangan psikologis yang dialami korban doxing berbeda dari korban bullying biasa; mereka menghadapi rasa takut yang lebih mendalam karena privasinya terbuka untuk publik, sehingga merasa tidak aman dengan hidup pribadinya yang dapat diakses siapa saja. Untuk menanggapi hal ini, GAK memberikan pendampingan psikologis dan ruang aman bagi korban untuk bercerita tanpa rasa dihakimi, serta membantu mereka membangun kembali rasa percaya diri dan memberikan edukasi tentang keamanan digital.

“Ketika korban datang kepada kami, hal pertama yang kami lakukan adalah memastikan mereka merasa aman dan tidak dihakimi. Kami tidak pernah memaksa korban mengambil langkah tertentu. Semuanya tergantung kesiapan dan kenyamanan mereka, karena pemulihan adalah proses yang harus mereka

jalani dengan dukungan penuh, bukan dengan tekanan atau tuntutan dari pihak mana pun.” (Pendamping BPH GAK, wawancara 26 Juli 2025).

“Yang paling berat itu ketika korban sudah mau cerita, tapi masih takut kasusnya tidak ditangani serius atau justru malah disalahkan balik. Di GAK, kami selalu berusaha membuat mereka yakin bahwa suara mereka penting, dan kami hadir untuk mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menyebarkan, dan tanpa memaksa mereka mengambil langkah yang belum siap mereka lakukan.” (Kak Meysa, anggota aktif GAK, wawancara 26 Juli 2025).

Hambatan Struktural dalam Penanganan KBGO

Strategi GAK dalam mencegah cyberbullying di lingkungan kampus, seperti Binus, bersifat edukatif dan preventif melalui kegiatan diskusi, seminar, atau kampanye media sosial untuk menanamkan empati digital dan tanggung jawab berinternet. Namun, ketika menghadapi narasi kekerasan seksual di grup online terbuka seperti “Fantasi Sedarah,” pendekatan yang digunakan lebih tegas dan berbasis advokasi dengan fokus pada pelaporan konten berbahaya dan penyebaran kontra-narasi. Hambatan terbesar yang dihadapi GAK adalah minimnya kesadaran dan keberpihakan institusi terhadap korban, di mana banyak kampus dan platform digital lebih fokus pada citra lembaga dibanding pemulihan korban. Selain itu, aturan hukum terkait kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia masih terbatas, sehingga proses advokasi sering terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Kerja sama antara GAK, pihak kepolisian, dan pihak kampus bersifat kolaboratif namun tidak selalu berjalan mulus. GAK berperan sebagai penghubung antara pendekatan hukum dari kepolisian dan pendekatan kemanusiaan untuk pemulihan korban, sementara kampus berada dalam posisi dilematis antara ingin membantu dan khawatir soal reputasi institusi. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa fokus utama tetap pada keselamatan dan pemulihan korban, bukan sekadar penyelesaian administratif.

Tetapi, hasil penelitian juga menemukan adanya beberapa hambatan yang dihadapi komunitas. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta kurangnya dukungan regulasi yang secara khusus mengatur KBGO. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penerapannya di ranah digital masih belum optimal karena kurangnya mekanisme hukum yang konsisten untuk bukti elektronik. Di sisi lain, stigma sosial terhadap korban masih kuat, sehingga banyak korban enggan melapor atau memilih diam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat solidaritas di antara anggota GAK menjadi kekuatan utama yang membuat komunitas ini terus bertahan. Kolaborasi lintas aktor antara kampus, lembaga hukum, organisasi sosial, dan jaringan regional menjadi bentuk nyata dari kerja kolektif komunitas dalam memperjuangkan keadilan digital. GAK memandang bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kerja sama banyak pihak.

Temuan penelitian terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi anggota komunitas dalam melaksanakan program aksinya disampaikan oleh dua informan berikut ini.

“Tantangan terbesar kami adalah ketika platform digital tidak merespons cepat permintaan penghapusan konten. Prosesnya kadang memakan waktu

berhari-hari, sementara konten yang merugikan korban terus menyebar lebih luas. Ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan digital kita masih membutuhkan banyak penguatan, baik dari sisi regulasi maupun komitmen platform.” (Kak Raden, anggota GAK Regional Banten, wawancara 26 April 2025).

“Kami sering berhadapan dengan situasi di mana kampus lebih memilih menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga nama baik institusi, bukan berfokus pada pemulihan korban. Padahal, pendekatan seperti itu justru membuat korban semakin tidak berani bersuara dan merasa sendirian dalam menghadapi persoalannya. Koordinasi yang berpihak pada korban harus menjadi prioritas utama, bukan perlindungan citra lembaga.” (Pendamping BPH GAK, wawancara 26 Juli 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GAK telah bertransformasi menjadi bentuk gerakan sosial digital yang menggabungkan nilai-nilai empati, kesetaraan, dan pemberdayaan. Komunitas ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan di dunia maya. Aktivitas mereka menjadi bukti bahwa ruang digital dapat dijadikan sarana advokasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan membangun budaya baru yang berkeadilan gender. Dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas, GAK berhasil menciptakan gerakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif mengubah pengalaman kekerasan menjadi gerakan sosial yang memperjuangkan keamanan dan martabat manusia di ruang digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Generasi Anti Kekerasan (GAK) berperan sebagai gerakan sosial digital dalam merespons isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui edukasi publik, kampanye media sosial, serta pendampingan korban. Aktivitas yang dilakukan GAK memperlihatkan bahwa media digital tidak hanya menjadi ruang terjadinya kekerasan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran kolektif, solidaritas sosial, dan resistensi terhadap kekerasan berbasis gender di ruang siber. Pendekatan *victim-centered* yang diterapkan komunitas turut membantu korban memperoleh ruang aman, dukungan emosional, serta akses pendampingan psikologis dan advokasi hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan KBGO masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan stigma sosial terhadap korban. Meskipun demikian, kolaborasi antara komunitas, lembaga pendidikan, dan pihak terkait menjadi kekuatan penting dalam mendukung perlindungan korban di ruang digital. Penelitian ini masih terbatas pada satu komunitas sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian serta menelaah efektivitas kebijakan perlindungan korban KBGO di Indonesia.

REFERENSI

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Karimi, Y., Squicciarini, A., & Wilson, S. (2022). Automated Detection of Doxing on Twitter. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW2), Article 276. <https://doi.org/10.1145/3555167>
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/catatan-tahunan>
- Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073-1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Purwaningtyas, M. P. F. (2021). Indonesian Women's Activism in Social Media: A Virtual Ethnography Study in the Instagram. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 18(2), 141-162. <https://doi.org/10.24002/jik.v18i2.3343>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Nyimak: Journal of Communication*, 5(1). <https://doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3218>
- Shalatan, R., Sastro, E. L. A., Nenohai, J. H. B., Amalina, Z. N., Simone, P. N., & Ranjani, S. (2026). Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 3(3), 573-587. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i3.2454>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.
- UNFPA. (2024). *A Framework for Technology-Facilitated Gender-Based Violence Programming*.
- Yuli, Y., Julianti, V., Lazarus, Suparba, R. D. M. A., Sembogo, A. D. A., & Nadia, F. B. A. (2024). Perundungan pada Sekolah Internasional: Sebuah Analisis Kasus Perundungan di Binus School Serpong. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).